



## DALAM EDISI BULAN INI

- 01 FORCLIME siap dukung pendampingan kegiatan perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat
- 02 Konferensi bersama FORCLIME, PROPEAT, SASCI, dan SASCI+
- 03 FORCLIME 4.0 siap dukung Balai Diklat LHK Makassar tingkatkan kapasitas SDM kehutanan di Tanah Papua
- 04 FORCLIME dukung Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pembiayaan *Green Climate Fund*
- 05 FORCLIME 4.0 siap tampung siswa KKN Universitas Papua melalui program magang
- 06 FORCLIME 4.0 akan lanjutkan program magang bagi siswa Universitas Cenderawasih
- 07 Kementerian LHK ajak FORCLIME bahas persiapan evaluasi Program Bakti Rimbawan

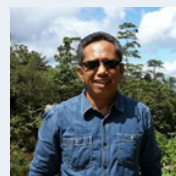
## Editorial

Newsletter FORCLIME edisi bulan Juli ini menyajikan artikel khusus terkait dengan proses dan progres pengajuan pendanaan perubahan iklim kepada *Green Climate Fund* (GCF) yang sedang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat melalui Pokja REDD+ Kalbar. Inisiatif tersebut, didukung oleh FORCLIME mulai akhir tahun 2019.

Artikel lain yang ditampilkan dalam Edisi bulan Juli ini terkait dengan kesiapan FORCLIME 4.0 mendukung kegiatan-kegiatan di wilayah kerjanya, diantaranya kesiapan pendampingan kegiatan perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat, magang bagi siswa KKN dari Universitas Papua dan Universitas Cenderawasih, kesiapan untuk mendukung Balai Diklat LHK Makassar dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM kehutanan di Tanah Papua, serta kesiapan mendukung Pusat Perencanaan dan Pengembangan (Pusrenbang) SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan evaluasi Program Bakti Rimbawan 2021.

Artikel yang tidak kalah penting adalah pertemuan tiga program kerja sama pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia yang dilaksanakan oleh GIZ, yaitu FORCLIME (*Forests and Climate*

*Change Programme*), PROPEAT (*Peatland Management and Rehabilitation*), SASCI (*Sustainable Agricultural Supply Chains in Indonesia*), dan SASCI+ (*Sustainability and Value-Added in Agricultural Supply Chains in Indonesia*). Melalui pertemuan ini terbangun komunikasi dan sinergi antar program yang dilaksanakan GIZ. Manfaat lain dari pertemuan ini, selain berbagi pengetahuan dan pengalaman yang bersifat teknis, adalah dengan lebih saling mengenal satu sama lain dapat dibangun komunikasi informal yang lebih baik antar program. Seperti diketahui bersama, komunikasi dan sinergi adalah elemen kunci yang berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan program.



**Wandojo Siswanto**

Manajer bidang strategis kebijakan hutan dan perubahan iklim

# FORCLIME siap dukung pendampingan kegiatan perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat

10 – 12 Juni 2021



**B**alai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Maluku dan Papua mengadakan lokakarya bagi tenaga pendamping perhutanan sosial di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tanggal 10 – 12 Juni 2021 di Kota Sorong, Papua Barat. Dalam acara tersebut, FORCLIME diundang sebagai salah satu narasumber untuk berbagi pengalaman mengenai “Peran Pendamping Masyarakat berbasis Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu”. Materi yang disampaikan oleh Manajer bidang strategis pengelolaan hutan lestari, Mohammad Sidiq, terkait dengan tugas dan fungsi pendamping perhutanan sosial (PS) sebelum dan setelah izin diperoleh oleh kelompok PS. Dalam kesempatan tersebut FORCLIME juga berbagi pengalaman selama mendukung program PS di Kalimantan dan Palu pada periode fase 3.

Dalam pelaksanaan programnya di Papua Barat, FORCLIME 4.0 siap mendukung penyusunan *roadmap* Perhutanan Sosial, pemberdayaan kelompok masyarakat di desa pilot wilayah kerja FORCLIME, pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

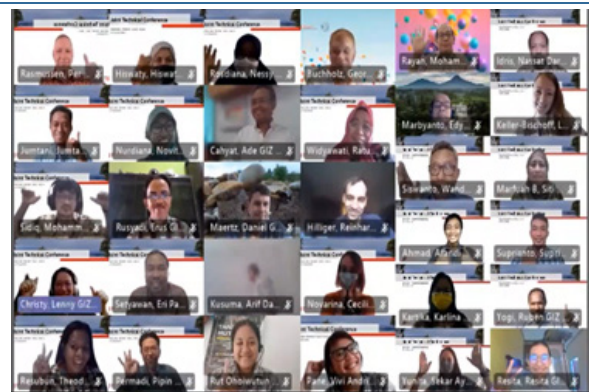
*“Saya merasa senang dengan materi yang diberikan, karena ini memberikan harapan dan semangat bagi kelompok usaha kami. Ini juga menjadi pedoman bagi kami untuk mengetahui apa yang menjadi bagian dan mana yang perlu untuk diperkuat oleh lembaga kami. Berdasarkan materi ini, ada pelatihan yang sudah kami lakukan dan ada yang belum dilakukan, sehingga kami tahu pelatihan apa yang perlu dilakukan”,* kata Arkilaus Kladit, *local champion* dari Kampung Sira Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, setelah mendengarkan materi dan pengalaman yang dipaparkan oleh FORCLIME.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai dukungan FORCLIME terkait perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat, silakan hubungi:  
[Melanesia Boseran](#), Advisor junior bidang pengelolaan dan konservasi hutan  
[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

## Konferensi bersama FORCLIME, PROPEAT, SASCI, dan SASCI+

14-15 Juni 2021

Komunikasi dan sinergi antar program GIZ telah diakui sebagai salah satu elemen kunci yang berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan program. Semangat tersebut menyatukan FORCLIME (*Forests and Climate Change Programme*), PROPEAT (*Peatland Management and Rehabilitation*), SASCI (*Sustainable Agricultural Supply Chains in Indonesia*), dan SASCI+ (*Sustainability and Value-Added in Agricultural Supply Chains in Indonesia*) mengadakan konferensi bersama perdana yang diadakan pada 14-15 Juni 2021. Konferensi yang dilaksanakan secara daring menggunakan Microsoft Teams ini dihadiri oleh lebih dari 40 peserta. Konferensi dibuka dengan pemaparan secara umum dari masing-masing pimpinan program, yang kemudian dilanjutkan dengan presentasi tematik tentang HCV (*High Conservation Value*), kegiatan berbasis masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, penilaian skala lahan (*landscape assessment*), dan sesi berbagi pengalaman dan pembelajaran terkait dengan pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) di dalam program.



“Salah satu manfaat tambahan dari konferensi ini, selain berbagi pengetahuan teknis, adalah bahwa kita bisa lebih saling kenal satu sama lain dan ini mengakibatkan komunikasi informal yang lebih baik di antar program”, kata Per Rasmussen, pimpinan program SASCI, pada sesi penutupan acara.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:  
[Sekar Yunita](#), Advisor bidang Monitoring & Evaluasi/Pengelolaan Hutan Lestari, FORCLIME  
[Karlina Kartika](#), Advisor bidang Pembangunan KPH, Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Pengetahuan, PROPEAT  
[Hiswaty](#), Advisor bidang Monitoring & Evaluasi dan Pengelolaan Pengetahuan, SASCI  
[Cecilia Novarina](#), Advisor bidang Pengelolaan Pengetahuan dan Komunikasi, SASCI+

# FORCLIME 4.0 siap dukung Balai Diklat LHK Makassar tingkatkan kapasitas SDM kehutanan di Tanah Papua

16 Juni 2021



**B**iro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku *project executing agency* FORCLIME bersama dengan perwakilan dari Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) serta Tim FORCLIME berkunjung ke Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar (BD LHK Makassar), Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Juni 2021. Dalam kunjungan tersebut perwakilan dari Biro Perencanaan (Birocan) menyampaikan bahwa FORCLIME yang dilaksanakan mulai Januari 2021 hingga Desember 2023 mempunyai wilayah kerja di Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat. Rencana Strategis Program FORCLIME periode 2021-2023 dan Rencana Kerja FORCLIME tahun 2021 telah ditandatangani sehingga siap diimplementasikan.

Menambahkan keterangan Birocan, Direktur Program FORCLIME menyampaikan bahwa karena kewenangan pengembangan kapasitas untuk wilayah Indonesia Timur berada di bawah koordinasi BD LHK Makassar, maka FORCLIME akan menempatkan Manajer bidang strategis pengembangan SDM, Edy Marbyanto; dan seorang *Development Adviser*, Daniel Maertz, di BD LHK Makassar. Penempatan dua personel ini diharapkan dapat membantu meningkatkan layanan pengembangan SDM LHK di wilayah Tanah Papua. Menanggapi hal tersebut, Kepala BD LHK Makassar menyambut baik rencana penempatan personel FORCLIME di BD LHK

Makassar dan akan menyediakan ruang kerja untuk tim FORCLIME. Ruang kerja tersebut saat ini masih dalam proses renovasi berbarengan dengan renovasi ruangan-ruangan lain di BD LHK Makassar. Untuk sementara, personel FORCLIME dapat menggunakan ruangan lain yang tersedia.

Dalam kunjungan tersebut, Tim FORCLIME dan rombongan tamu lainnya berkunjung ke Hutan Diklat Tabo-tabo yang dikelola BD LHK Makassar yang berjarak sekitar 60 km dari kota Makassar. Perwakilan Sekretariat BP2SDM menginformasikan bahwa BP2SDM sedang mendorong sinergi antara Balai Diklat LHK Makassar dengan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMK Kehutanan) Makassar dalam pengembangan Hutan Diklat Tabo-tabo. Di tahun ajaran 2021-2022, rencananya sebagian siswa akan ditempatkan dan belajar langsung di Kawasan Hutan Diklat Tabo-tabo dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Pembelajaran di lapangan ini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi. Diharapkan FORCLIME dapat berkontribusi secara positif dalam pengembangan Hutan Diklat Tabo-tabo sebagai sarana Diklat, penelitian dan juga pemberdayaan masyarakat sekitar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Edy Marbyanto](#), Manajer bidang strategis pengembangan SDM

# FORCLIME dukung Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pembiayaan *Green Climate Fund*

Inisiatif mendapatkan pembiayaan terkait perubahan iklim dari *Green Climate Fund* (GCF) dimulai sejak disampaikannya *concept note* oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Kelompok kerja *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* atau Pokja REDD+ pada Oktober 2019 kepada *National Designated Authority* (NDA) GCF Indonesia yang berkedudukan di Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

GCF adalah lembaga pengelola dana khusus perubahan iklim terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (mitigasi) dan meningkatkan kemampuan untuk menanggapi perubahan iklim (adaptasi). Lembaga yang didirikan oleh *United Nations Frameworks Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada 2010 ini, memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, mendukung upaya untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata dibawah 2 derajat Celsius.

GCF bertujuan untuk mengatalisasi aliran pendanaan iklim untuk berinvestasi dalam pembangunan rendah emisi dan meningkatkan daya lentur terhadap perubahan iklim serta mendorong perubahan paradigma dalam respon global terhadap perubahan iklim. Hal ini dilakukan dengan menyalurkan pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang yang telah bergabung bersama negara-negara lainnya dalam melakukan aksi iklim.

Berkolaborasi dengan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, LSM Bentang Kalimantan dan didukung oleh GIZ selaku lembaga terakreditasi/*Accredited Entity* (AE) pada GCF, Pokja REDD+ Kalbar menyusun *concept note* pembiayaan iklim yang diajukan kepada GCF. Usulan tersebut diberi judul: **Memperkuat Tindakan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Provinsi untuk Mendukung Pencapaian Target Perubahan Iklim Nasional melalui Pendekatan Yurisdiksi dalam REDD+ (*Strengthening the Provincial Mitigation Action to Support National Climate Change Target and a Jurisdictional Approach in REDD+*)**.

Penyusunan *concept note* tersebut didasarkan pada pembelajaran dan pengalaman Pokja REDD+ dalam mengawal isu perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Barat dan didasarkan atas dokumen-dokumen strategis yang dimiliki, seperti dokumen Tingkat Emisi Rujukan Sektor Kehutanan dan Sektor Berbasis Lahan yang telah disinkronisasikan dengan Tingkat Emisi di Tingkat Nasional (*Forest Reference Emission Level /FREL*), dokumen Strategi Rencana Aksi Penurunan Emisi (SRAP) beserta revisinya, Petunjuk Teknis Pengukuran Karbon, Pemantauan Emisi GRK dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Periode 2013-2016, dokumen Strategi Intervensi Penurunan Emisi (SIPE) serta beberapa dokumen pendukung lainnya.

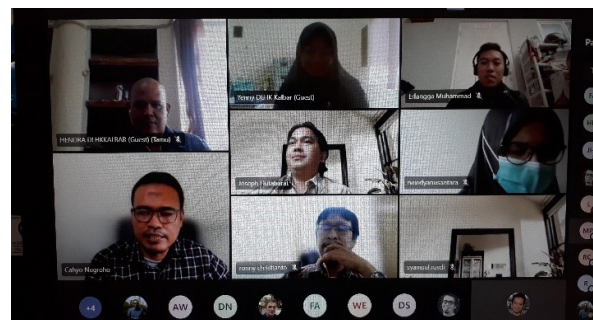
Setelah dinyatakan lolos seleksi gagasan *project concept note* pada Desember 2019 oleh NDA Indonesia, tahap berikutnya diawali dengan mengikuti pelatihan penyusunan *concept note* yang diselenggarakan oleh NDA Indonesia, proses *matchmaking* dengan *Accredited Entity*, dan *review* terhadap *concept note* yang disampaikan untuk penyeragaman dengan program negara dalam pencapaian target nasional.

Dalam upaya mendapatkan *concept note* yang diharapkan dan lebih baik, Pokja REDD+ melakukan beberapa pertemuan untuk pembahasan, baik di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan beberapa tempat lainnya. Diskusi dalam pertemuan-pertemuan ini dimaksudkan untuk mengembangkan gagasan berdasarkan upaya yang telah dibangun dan mengharmonisasikan dengan kerangka penulisan *concept note* sesuai arahan Sekretariat GCF.



Gambar 1-2. Diskusi Pokja REDD+ setelah mengikuti pelatihan dan peninjauan untuk perbaikan *concept note* yang disampaikan kepada NDA GCF Indonesia

Dalam rangka memperkuat entitas pengusul di Provinsi Kalimantan Barat, dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan IDH dan FFI untuk memperkaya upaya yang akan dilakukan dalam *concept note*. Kedua lembaga ini selain sebagai anggota Pokja REDD+ juga diharapkan berbagi pembelajaran dan pengalaman dalam implementasi penurunan emisi terutama sesuai dengan bidangnya yang dilakukan dalam proses pendampingan dan kerja sama dengan sektor swasta dan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan skema perhutanan sosial serta konservasi sumberdaya alam.

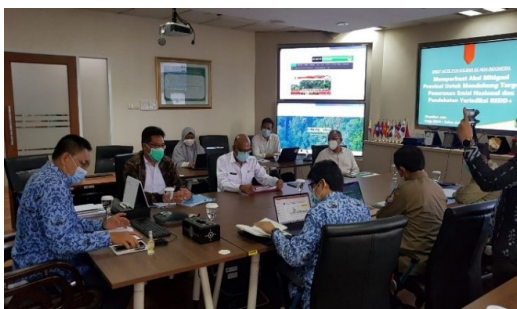


Gambar 3. Pertemuan Koordinasi Pokja REDD+ Kalbar dengan GIZ, IDH dan FFI dalam Diskusi Pengkayaan *Concept Note* Pembiayaan Perubahan Iklim

Koordinasi dan komunikasi terutama dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai institusi yang bertanggung jawab terkait pencapaian target penurunan emisi. Melalui surat yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal dukungan terhadap pengusulan pembiayaan perubahan iklim kepada GCF yang berikutnya diikuti dengan penyampaian surat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Barat dan untuk mengnyinergikan program penurunan emisi serta mendapatkan arahan nasional untuk proyek yang diusulkan.

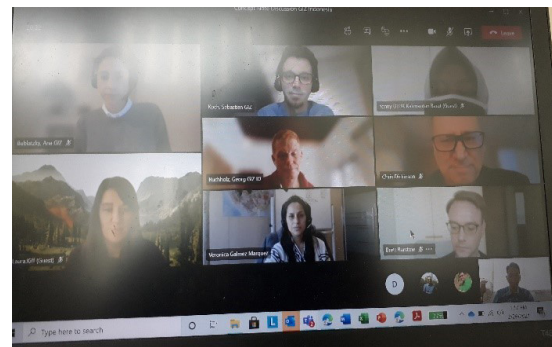
Pada November 2020, dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bapak AL. Leysandri, didampingi oleh Tim yang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Ir. Adiyani, MH; Ahli Perekonomian Kalbar, Prof. Dr. Eddy Suratman, ME; Ketua Pokja REDD+ Kalbar, Prof. Dr. Gusti Hardiansyah, MSc.QAM; dan anggota Pokja REDD+ menyampaikan presentasi perkembangan *concept note* Pembiayaan Perubahan Iklim kepada GCF. Rombongan Pemda Provinsi Kalbar ini diterima oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Bapak Dr. Ruandha Agung Sugardiman yang didampingi oleh Direktur Mobilisasi Sumber daya Sektor dan Regional, Bapak Dr. Wahyu Mardjaka serta Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi Bapak Dr. Syaiful Anwar.

Pada pertemuan tersebut Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim mendukung inisiatif dan upaya yang dilakukan Pemprov Kalbar melalui Pokja REDD+ bersama GIZ selaku *Accredited Entity* untuk mendapatkan alternatif pembiayaan perubahan iklim sebagai dukungan dan kontribusi sub nasional dalam pencapaian target nasional untuk penurunan emisi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *National Determined Contribution (NDC)*.



Gambar 4-5. Tim Pemprov Kalbar dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan Presentasi *Concept Note* Pembiayaan Perubahan Iklim kepada Dirjen Pengendalian Perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada awal tahun 2021, Sekretariat GCF memberikan tanggapan terhadap *concept note* dengan memberikan masukan untuk penambahan penguatan materi pengelolaan hutan dan lahan gambut, mangrove serta penguatan aksi adaptasi perubahan iklim. Merespon hal tersebut Pokja REDD+ kembali melakukan pertemuan para pihak yang dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan akademisi, dan LSM lokal, untuk kembali melakukan revisi sebagaimana masukan dan tanggapan yang diberikan, dimana perbaikan ini selanjutnya dibahas pada pertemuan dengan Sekretariat GCF pada 26 Februari 2021.



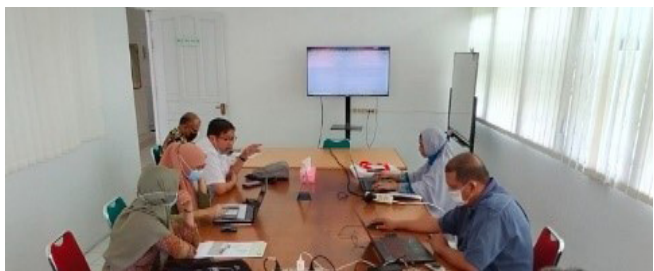
Gambar 6. Koordinasi para pihak yang diikuti oleh Dinas LHK, Pokja REDD dan GIZ dengan Sekretariat GCF, pada 26 Februari 2021

Selain berkomunikasi dengan Sekretariat GCF, penguatan komunikasi dan koordinasi juga dilakukan, diantaranya adalah komunikasi secara *online* antara entitas Kalbar yang terdiri dari Dinas LHK, Pokja REDD+, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, ahli ekonomi Kalbar dan LSM lokal dengan Tim GIZ dari Kantor Pusat dan GIZ Indonesia, yang dilaksanakan pada 13 April 2021.



Gambar 7-8. Koordinasi Meeting antara Tim Pemprov Kalbar yang diikuti oleh Kepala Dinas LHK, ahli ekonomi Kalbar, Fakultas Kehutanan Untan dan Tim Pokja dengan Tim GIZ sebagai *Accredited Entities*.

Selain fokus pada perbaikan *concept note* pembiayaan perubahan Iklim, Pokja REDD+ terus mengembangkan inisiatif untuk memperkuat upaya-upaya pengelolaan perubahan iklim di tingkat provinsi. Pada 6 Mei 2021, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, didukung oleh FORCLIME melakukan pertemuan penyusunan regulasi tentang pengukuran, pelaporan dan verifikasi bertempat di Sekretariat Pokja REDD+ Kalbar. Pertemuan dihadiri oleh anggota Pokja REDD+ yang terdiri dari perwakilan Dinas LHK, perguruan tinggi dan LSM lokal. Pertemuan Pokja REDD+ kali ini mendalami pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai upaya untuk mendukung target penurunan emisi di Kalimantan Barat sebagai upaya dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi yang ditetapkan dalam NDC. Selain itu regulasi yang dipersiapkan ini akan digunakan sebagai pedoman bagi Pokja REDD+ provinsi untuk melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan terkait REDD yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan.



Gambar 9-10. Tim Pokja REDD+ Kalimantan Barat membahas penyusunan peraturan gubernur tentang Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) di Provinsi Kalimantan Barat

Selain itu, pada tanggal 18 Juni 2021 Kepala Dinas Lingkungan dan Kehutanan bersama beberapa pihak lainnya, melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat untuk melaporkan perkembangan program kehutanan dan perubahan iklim. GIZ selaku lembaga terakreditasi melalui Advisor Kalimantan Barat berkesempatan menyampaikan perkembangan proses pengajuan pembiayaan perubahan iklim kepada *Green Climate Fund*. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa inisiatif pengajuan pembiayaan perubahan iklim yang dikoordinasikan oleh Pokja REDD+ bekerja sama dengan para pihak lainnya dan kegiatan yang akan dijalankan melalui program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian visi misi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta target nasional terkait perubahan iklim.

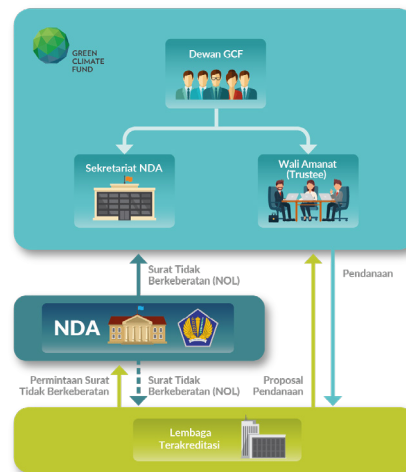
Menanggapi penyampaian dan *update* informasi beberapa proyek yang diusulkan dalam yurisdiksi Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur memberikan tanggapan dan arahan pentingnya memperkuat upaya-upaya yang dilakukan dengan membangun

kerja sama para pihak, baik dalam pengelolaan pemanfaatan hutan dan sumber daya alam, mendorong pengembangan inovasi dan kreasi yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam mewujudkan tata kelola kehutanan yang lebih baik dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan dengan mendorong menghasilkan produk unggul dengan nilai ekonomi yang tinggi.



Gambar 11-12. Audiensi kepada Gubernur Kalimantan Barat, dipimpin oleh Kepala Dinas LHK bersama para pihak lainnya

Proses pengajuan pembiayaan perubahan iklim yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Sekretariat GCF, pada saat ini dalam tahap evaluasi untuk menuju ke tahap berikutnya. Secara umum tahapan dan arsitektur pembiayaan perubahan iklim dari *Green Climate Fund* sebagaimana yang dikutip dalam web NDA GCF Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 13. Arsitektur Pembiayaan Green Climate Fund

*Concept note* yang disampaikan selanjutnya akan dibahas dalam Sidang Komite Investasi Perubahan Iklim (CIC) untuk persetujuan ke tahap berikutnya, yaitu penyusunan proposal pembiayaan penuh yang didahului dengan pelaksanaan kajian/studi kelayakan serta persiapan implementasi pelaksanaan proyek yang diusulkan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:  
**Jumtani**, Focal point GCF Kalimantan Barat, Advisor pembangunan hutan berkelanjutan dan rantai nilai  
**Wandojo Siswanto**, Manajer bidang strategis untuk kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

## FORCLIME 4.0 siap tampung siswa KKN Universitas Papua melalui program magang

21 Juni 2021



Dalam rangka mempersiapkan program kegiatan bersama dengan Universitas Papua, Tim FORCLIME Papua Barat bersama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Papua mengadakan rapat koordinasi pada 21 Juni 2021 di Manokwari, Papua Barat. Tim FORCLIME dipandu oleh Manajer bidang strategis untuk pengelolaan hutan lestari, Mohammad Sidiq. Sedangkan dari Universitas Papua (Unipa) diwakili oleh Dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Jonni Marwa.

Program yang akan dilakukan bersama antara lain adalah kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa Unipa yang akan ditampung melalui program magang di FORCLIME. Para siswa magang ini nantinya akan dilibatkan dalam program kerja FORCLIME di desa – desa binaan (Tambrau dan Sorong Selatan). Namun karena periode KKN tahun 2021 telah berakhir, maka kegiatan akan dilaksanakan tahun 2022.

[Pada tahun 2019, FORCLIME menyelenggarakan program magang bagi siswa dari Universitas Papua dan Universitas Cenderawasih.](#) Pada periode tersebut, tujuh sarjana baru Unipa melakukan magang dan ditempatkan di kantor dan wilayah kerja FORCLIME (Jakarta, Bogor, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah). [Program magang ini berlanjut di tahun 2020](#), dengan lima orang dari Unipa dan satu siswa dari Universitas Ottow Geissler. Namun karena adanya pandemi COVID 19, maka magang dilakukan secara daring dibawah supervisi Advisor FORCLIME.

*“Kami berterimakasih atas kerja sama FORCLIME dan Fakultas Kehutanan. Melalui kerja sama ini, mahasiswa kami diberi kesempatan untuk mengikuti magang, bahkan ada juga yang sudah direkrut sebagai staf FORCLIME”*, kata Dr. Jonni Marwa, Dekan Fakultas Kehutanan Unipa.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Papua dan Papua Barat

[Nita Yohana](#), Koordinator Provinsi Papua Barat

## FORCLIME 4.0 akan lanjutkan program magang bagi siswa Universitas Cenderawasih

23 Juni 2021

FORCLIME akan melanjutkan program magang bagi siswa universitas di Tanah Papua, termasuk Universitas Cenderawasih, [seperti yang telah dilaksanakan pada tahun 2019](#). Pada tahun itu, delapan siswa tingkat akhir Universitas Cenderawasih melakukan magang di FORCLIME dan [ditempatkan di wilayah kerja FORCLIME](#) di Kalimantan (barat, timur, utara), Palu, Bogor dan Jakarta. Untuk persiapan rencana kegiatan ini, FORCLIME dan Universitas Cenderawasih mengadakan pertemuan pada tanggal 23 Juni 2021 di Kota Jayapura, Papua. Program magang ini, seperti KKN tematik, diharapkan dapat memberikan pengalaman kerja dan pengetahuan bagi para siswa terkait topik-topik program FORCLIME 4.0. Peserta magang akan ditempatkan sesuai dengan minat dari siswa yang bersangkutan. Untuk itu, pihak universitas akan mengajukan beberapa kandidat yang kemudian akan diseleksi oleh FORCLIME.



*“Program magang ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan dan juga pengalaman kerja, sudah ada [dua mahasiswa jurusan Geofisika yang melakukan magang terkait pemetaan di FORCLIME](#) dan sangat membantu jurusan di kampus”*, kata Dr. Yusuf Bunggang, Kepala Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Cenderawasih.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Theodora Resubun](#), Koordinator Provinsi Papua

[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

# Kementerian LHK ajak FORCLIME bahas persiapan evaluasi Program Bakti Rimbawan

23 Juni 2021



Inventarisasi hutan di desa Benua Tengah, Kapuas Hulu  
Foto: Dominik



Testing Juknis inventarisasi hutan, Kapuas Hulu  
Foto: Moritz

Sebagai tindak lanjut pertemuan terkait dengan rencana evaluasi program Bakti Rimbawan 2021, Pusat Perencanaan dan Pengembangan (Pusrenbang) SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama FORCLIME mengadakan pertemuan koordinasi pada tanggal 23 Juni 2021 untuk membahas persiapan evaluasi Program Bakti Rimbawan 2021. Pertemuan yang diadakan secara daring dan luring tersebut dibuka oleh Dr. Iwan Setiawan, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi SDM non-aparatur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Evaluasi Program Bakti Rimbawan tersebut akan fokus pada:

1. Analisis cakupan bidang kerja Program Bakti Rimbawan;
2. Analisis dampak Program Bakti Rimbawan terhadap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
3. Tantangan dan kendala Program Bakti Rimbawan, mencakup pra-penempatan, pasca-penempatan, dan pengaruh dari Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 23/2021 terhadap program Bakti Rimbawan;
4. Keberlanjutan dan exit strategy Program Bakti Rimbawan, termasuk kebijakan, kelembagaan, dan program.

Salah satu kunci yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan evaluasi Program Bakti Rimbawan 2021 adalah penentuan lokasi. Perlu adanya keterwakilan dari provinsi yang sudah siap dan belum siap untuk membiayai Program Bakti Rimbawan secara swadaya. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Iwan Setiawan mengusulkan kriteria pemilihan lokasi yang berdasarkan: 1) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DBH-DR) dari pemerintah provinsi yang tinggi; serta 2) KPH yang sudah mandiri secara finansial. Dalam hal ini ada empat provinsi yang bisa dijadikan sebagai model, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Beberapa provinsi lain yang potensial adalah: Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat.

*“Tentu kami ingin melihat seberapa besar dampak serta keberadaan dari Program Bakti Rimbawan ini terhadap KPH, serta keberlanjutannya. Kami ingin program Bakti Rimbawan juga bisa diadopsi oleh pemerintah provinsi. Kita harapkan adanya alternatif kebijakan untuk Program Bakti Rimbawan di daerah yang bisa kami usulkan setelah mendapatkan hasil evaluasi”, kata Dr. Iwan Setiawan.*

Pertemuan koordinasi tersebut juga menyepakati jadwal pelaksanaan evaluasi. Laporan hasil evaluasi diharapkan sudah selesai pada bulan September 2021.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Edy Marbyanto](#), Manajer bidang strategis pengembangan SDM

[Wira Hakim](#), Advisor junior pengembangan SDM

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Alamat FORCLIME: Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Blok 7 lantai 6. Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat 10270  
T: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214  
[www.forclime.org](http://www.forclime.org)  
Surel korespondensi: [ratu.widyawati@giz.de](mailto:ratu.widyawati@giz.de)